

NEGARA DAN GOLKAR

(Studi tentang Konfigurasi Politik Indonesia 1971-2009)

Oleh : Gatot Sudjito
Dewan Perwakilan Rakyat RI

Abstract

The study aims to answer the question of how: (1) political configuration that puts Indonesia in 1971-1997 Golkar as a single force (2) political configuration in 1998 that caused the New Order government fell, and (3) the political configuration in 1999-2009 resulting Golkar political disorientation. The results: (1) the political configuration of Indonesia in 1971-1997 accidentally put Golkar as a single force on the grounds that the government can carry out the construction with smooth and stable. Sekber-military form with the government, Golkar then follow the 1971 general election and won an absolute acquire 62.82% of the vote. Thanks to that victory, Golkar and the military dominated parliament. Various attempts were made by the government in order to Golkar remains a singular force that harm the PPP and PDI, the result, until the 1997 election Golkar always wins absolute; (2) As a result of the New Order regime always manipulate the order absolute win Golkar, the public is not satisfied, the scent of corruption in the preparation of Development Cabinet VII concurrent multi-dimensional crisis of 1997 to encourage people demanded a change in many lives. The insistence of the President submit his cause to B.J. Habibie to date May 21, 1998. Since then New Order, (3) After the fall of the New Order, Golkar as also fell. With the remnants of the existing resources can Golkar following the 1999 elections, the results dropped dramatically compared to the 1997 election due to: (1) Chairman of the Board of Trustees of the New Order era Golkar political structure intact bequeath to future generations, (2) the Golkar elite divisions; (3) the loss of support of the military and civil servants, (4) a more competitive electoral policies, (5) the division of voters into 47 political parties, (6) the emergence of a new reformist parties. The success of the Golkar Party in the 2004 elections resulting from the internal side: (1) the Golkar Party fought a modern and independent party, (2) political machine that has formed revived; (3) more democratic, (4) the persistence of traditional voters, and (5) personal factors Akbar. Of external factors as: (1) some people miss the New Order government and reselect the Golkar Party, (2) Some supporters of the PDIP in the 1999 elections Golkar. Keywords: state, Golkar, political configuration.

Latar Belakang Masalah

Eksistensi partai politik di suatu negara merupakan indikasi demokratisasi di negara tersebut. Di negara yang konfigurasi politiknya responsif, peran partai politik sangat urgen. Sebab, aspirasi rakyat dapat diteruskan oleh Parpolnya melalui DPR/DPRD, demikian halnya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Disinilah peran partai politik dalam membangun negara, semakin kokoh partai politik, semakin besar peranannya dalam turut berkontribusi membangun negara. Demikian halnya Golkar, yang sengaja didirikan oleh Pemerintah Orde Baru sebagai alat untuk mengatur negara.

Sejarah Partai Golkar bermula pada 1964 dengan berdirinya Sekber Golkar di masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Sekber Golkar didirikan oleh golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat (seperti Letkol Suhardiman dari Soksi) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam

Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Sekber Golkar didirikan pada 20 Oktober 1964. Sekber Golkar lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik, baik di dalam maupun di luar Front Nasional, makin meningkat. Sekber Golkar merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada di bawah pengaruh politik tertentu. Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi.

Tujuh kumpulan induk organisasi (Kino) yang merupakan kekuatan inti Sekber Golkar mengeluarkan keputusan bersama pada 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (Golkar). Pada Pemilu 1971 ini, Sekber Golkar ikut serta menjadi salah satu kontestan. Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan Golkar sebagai kontestan Pemilu.

Hasilnya di luar dugaan. Golkar sukses besar dan berhasil menang dengan 34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan suara. Perolehan suaranya pun cukup merata di seluruh provinsi, berbeda dengan parpol yang berpegang kepada basis tradisional. NU hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di Sumatera Barat dan Aceh. Bahkan, Murba tidak memperoleh suara signifikan sehingga tidak memperoleh kursi DPR. Kemudian, sesuai ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, pada 17 Juli 1971 Sekber Golkar mengubah dirinya menjadi Golkar. Golkar menyatakan diri bukan parpol karena terminologi ini mengandung pengertian dan pengutamakan politik dengan mengesampingkan pembangunan dan karya.

Setelah Peristiwa G30S PKI, Sekber Golkar, dengan dukungan sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan PKI, kemudian juga kekuatan Bung Karno. Pada dasarnya Golkar dan TNI-AD merupakan tulang punggung rezim militer Orde Baru. Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar. Keluarga besar Golongan Karya sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal, yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi, dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi. Pemuka ketiga jalur tersebut melakukan fungsi pengendalian terhadap Golkar lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis. Dalam pemilu, Golkar selalu tampil sebagai pemegang. Kemenangan Golkar terus-menerus di setiap pemilu, yakni Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Tuntutan mundur Presiden Soeharto menggema di mana-mana. Soeharto akhirnya berhasil dilengserkan oleh gerakan mahasiswa. Hal ini kemudian berimbas pada Golkar. Karena Soeharto adalah penasehat partai, Golkar juga dituntut dibubarkan. Saat itu Golkar dicerca di mana-mana. Akbar Tandjung yang terpilih sebagai ketua umum di era ini kemudian berusaha keras mempertahankan partai. Di bawah kepemimpinan Akbar, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar. Saat itu Golkar juga mengusung citra sebagai Golkar baru. Upaya Akbar tak sia-sia, Dia berhasil mempertahankan Golkar dari serangan eksternal dan krisis citra.

Partai Golkar kemudian ikut Pemilu 1999, berkompetisi bersama partai-partai baru di era multipartai. Pada pemilu pertama era Reformasi, Partai Golkar mengalami penurunan suara di peringkat ke dua di bawah PDIP. Namun pada Pemilu 2004, Golkar kembali unggul, dengan 24.480.757 suara atau 21,58% suara sah. Pada Pemilu 2009 suara Partai Golkar kembali turun ke peringkat kedua. Pemenang pemilu dipegang oleh Partai Demokrat.

Sebenarnya di masa Akbar Tandjung, partai Golkar sudah mampu menunjukkan partai politik termmodern di tanah air dalam sistem kaderisasi yang ditandai adanya konvensi terbuka dan demokratis dalam perekrutan kader partai yang menjadi calon Presiden RI dari partai Golkar, namun setelah Jusuf Kalla dan Abu Rizal Bakri sebagai Ketua DPP, budaya konvensi tersebut sudah tidak diberlakukan lagi dan kesan otoriter sulit dihindarkan. Oleh karena itu, wajar jika Partai Golkar dinilai publik mengalami disorientasi politik. Masalah-masalah yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana konfigurasi politik Indonesia pada kurun 1971-1997 yang menempatkan Golkar sebagai kekuatan tunggal? 2. Bagaimana konfigurasi politik 1998 yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan Orde Baru dan Golkar? 3. Mengapa konfigurasi politik Indonesia kurun 1999-2009 mengakibatkan Golkar mengalami disorientasi politik?

Landasan Teori

Konsep Konfigurasi Politik

Konfigurasi politik dapat diartikan sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter (Mahfud, 2011: 24-26). Pada konfigurasi demokratis, partai politik dan lembaga perwakilan rakyat aktif berperan menentukan hukum atau politik nasional. Kehidupan pers relatif bebas, sedangkan peranan lembaga eksekutif (pemerintah) tunduk pada kemauan rakyat yang digambarkan lewat kehendak lembaga perwakilan rakyat. Sementara, pada konfigurasi politik otoriter yang terjadi adalah sebaliknya. Selain itu juga dapat dilihat karakter produk hukumnya, yakni yang produk hukum responsif/populistik, dihasilkan oleh sistem pemerintahan dengan konfigurasi politik demokratis dan produk hukum konservatif/ ortodoks/elitis dihasilkan oleh sistem pemerintahan dengan konfigurasi politik otoriter.

Teori tentang Negara

Soltau (1962) membatasi konsep dasar negara sebagai: *The state is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community.* Weber (1958) berpendapat bahwa negara adalah *“the state is human society that (successfully) claim the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory”*. *The state is a society which is integrated by possessing a coercive authority legally supreme over any individual or group which is part of the society* (Laski, 1847:8-9). *The State is an association which, acting through law as promulgated by a government endowed to this end with coercive power, maintains within a community territorially demarcated the external condition of orders* (Iver, 1955:22).

Miriam Budiarjo berpendapat bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolitis dari kekuasaan yang sah (Budiarjo, 1985:40-41). Penulis sependapat dengan Budiarjo bahwa unsur negara meliputi: (1) daerah teritorial; (2) ada pejabat (pemerintah); (3) ada rakyat; (4) ada undang-undang yang harus dipatuhi warga Negara; dan (5) ada kekuasaan yang sah.

Teori tentang Partai Politik

Neuman (dalam Budiardjo, 1998:16-17) mengemukakan bahwa partai politik merupakan organisasi yang didalamnya terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat. Mereka memusatkan perhatiannya pada upaya menguasai kekuasaan pemerintahan dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat. Partai politik juga merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuasaan-kekuasaan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.

Surbakti (1992: 113-114) mengemukakan tiga teori tentang asal-usul partai politik, yaitu: Teori Kelembagaan, Teori Situasi Historis, dan Teori Pembangunan. Teori Kelembagaan mengatakan bahwa partai politik ada karena dibentuk oleh kalangan legislatif (dan atau eksekutif) karena kedua anggota lembaga tersebut ingin mengadakan kontak dengan masyarakat sehubungan dengan pengangkatannya, agar tercipta hubungan dan memperoleh dukungan dari masyarakat maka terbentuklah partai politik.

Teori Situasi Historis menjelaskan krisis situasi historis yang terjadi manakala suatu sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari struktur masyarakat tradisional ke arah struktur masyarakat modern. Pada situasi ini terjadi berbagai perubahan yang menimbulkan tiga macam krisis, yakni legitimasi, integrasi dan partisipasi. Partai politik lahir sebagai upaya dari sistem politik mengatasi krisis yang terjadi.

Teori Pembangunan menjelaskan bahwa partai politik lahir sebagai akibat dari adanya proses modernisasi sosial-ekonomi, seperti pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi, urbanisasi, perluasan kekuasaan negara seperti birokratisasi, pembentukan berbagai kelompok kepentingan dan organisasi profesi, dan peningkatan kemampuan individu yang mempengaruhi lingkungan, melahirkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut.

Adanya legitimasi dari masyarakat terhadap sebuah partai politik merupakan hal yang penting. Partai politik juga harus memiliki cabang di daerah-daerah agar dapat mengakar dalam masyarakat local. Masa hidupnya tidak bergantung pada masa jabatan atau masa hidup pemimpinnya. Partai politik bertujuan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan pemerintahan dengan menempatkan orang-orangnya dalam lembaga legislatif, partai politik harus turut serta dalam pemilihan umum.

Koirudin (2004: 86 -103) menuliskan beberapa fungsi partai politik yaitu : (1) fungsi artikulasi kepentingan, (2) fungsi agregasi kepentingan, (3) fungsi sosialisasi politik, (4) fungsi rekrutmen politik, dan (5) fungsi komunikasi politik.

Menurut Riadi (2013), dalam negara demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai sarana : (1) komunikasi politik (*political communication*); (2) sosialisasi politik (*instrument of political socialization*); (3) rekrutment politik (*political recruitment*); (4) pengatur konflik (*conflict management*); (5) pendidikan politik (*political education*); (6) pemilihan pemimpin-pemimpin politik (*political selection*); (7) pemaduan pemikiran-pemikiran politik (*political aggregation*); dan (8) sebagai sarana tata hubungan politik (*political communication*).

Ditinjau dari komposisi dan fungsi keanggotaannya, secara umum partai politik dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu partai massa dan partai kader. Partai massa lebih mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota. Partai kader lebih mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Pimpinan partai biasanya menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut.

Sartori (1976) mengklasifikasikan sistem kepartaian menjadi 4 macam, yaitu Sistem dua Partai, Pluralisme Moderat, Pluralisme Terpolarisasi dan Sistem Partai Berkuasa. Sistem dua partai ditandai

oleh adanya dua partai yang terus bersaing di dalam setiap pemilu serta paling memiliki pendukung luas. Kedua partai tersebut dapat saja memiliki ideologi yang berbeda ataupun isu-isu politik yang kontras. Dalam Sistem Pluralisme Moderat partai-partai politik di dalamnya memiliki ideologi yang berbeda-beda, namun tidak begitu tajam sehingga dapat saja para pemilih “berpindah” dari partai satu ke partai lainnya. Demikian pula, di tingkatan parlemen, partai-partai yang memiliki perbedaan ideologi tetap dapat menjalin koalisi jika memang diperlukan guna “menggolkan” suatu kebijakan. Dalam Sistem Pluralisme Terpolarisasi partai-partai politik memiliki ideologi yang berbeda-beda secara fundamental sehingga sulit bagi pemilih berpindah ke partai lainnya. Demikian pula, di tingkatan parlemen, perbedaan ideologi tersebut membuat sulitnya tercipta koalisi. Dalam sistem Partai Berkuasa terdapat sejumlah partai, tetapi ada sebuah partai yang selalu memenangi pemilihan umum. Partai yang selalu menang tersebut menjadi dominan dari sisi basis massa, dukungan pemerintah maupun kemenangan kursi mereka di setiap pemilihan umum. Menurut Budiardjo (1982) ada tiga sistem partai: (1) sistem partai tunggal; (2) sistem dwipartai; dan (3) sistem multipartai.

Sistem kepartaian di Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan pergantian tipe sistem politik. Tipikal sistem kepartaian apa yang berlaku di suatu negara, secara sederhana dapat diukur melalui fenomena pemilihan umum. Dari sisi jumlah misalnya, suatu negara dapat disebut sebagai bersistem satu partai, dua partai, atau multipartai, dapat dilihat dari berapa banyak partai yang ikut serta dalam pemilu berikut perolehan suara mereka.

Metode Penelitian

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Akan dianalisis gejala-gejala sosial dan budaya yang terjadi selama periode batas waktu yang ditetapkan, yakni konfigurasi politik 1971-2009 dan faktor-faktor yang menyebabkan Partai Golkar mengalami disorientasi politik. Peneliti berupaya mengkonstruksi realitas sosial atau makna kultural yang ada.

Fokus Penelitian

Fokus penelitiannya adalah proses atau kejadian-kejadian yang saling berinteraksi yang terkait dengan konfigurasi politik Indonesia 1971-2009 dan faktor-faktor yang menyebabkan Partai Golkar mengalami disorientasi politik dimana keaslian menjadi kuncinya dan biasanya peneliti terlibat (Tandjung, 2007: 31). Fokus penelitian tersebut diklasifikasi menjadi tiga, yaitu:

1. konfigurasi politik Indonesia 1971-1997 yang menempatkan Golkar sebagai kekuatan tunggal;
2. konfigurasi politik Indonesia 1998 yang menyebabkan pemerintahan Orde Baru jatuh.
3. konfigurasi politik Indonesia 1999-2009 yang mengakibatkan Partai Golkar mengalami disorientasi politik.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Indonesia, terutama di beberapa wilayah tempat informan berdomisili. Penelitian dan penulisan laporan hasil penelitian dilakukan pada Mei 2013 – Desember 2013.

Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa dokumen tertulis yang telah dipublikasikan melalui berbagai media yang terkait dengan fokus penelitian. Data primer berupa informasi yang diperoleh langsung dari narasumber yang kompeten dan terkait dengan fokus penelitian ini. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam pedoman wawancara mengacu pada fokus penelitian dengan rincian sebagai berikut.

1. Konfigurasi politik Indonesia 1971-1997 yang menempatkan Golkar sebagai kekuatan tunggal. Aspek yang ditanyakan kepada informan meliputi:
 - a. konfigurasi politik: ABRI, Golkar, dan Birokrasi (1964-1971);
 - b. alasan Pemerintah menjadikan Golkar sebagai *Government party*;
 - c. berbagai kebijakan pemerintah untuk menjadikan Golkar sebagai kekuatan tunggal dan dampaknya bagi PPP dan PDI, di antaranya:
 - 1) kebijakan fusi partai pada 1973.
 - 2) penetapan UU No. 3 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa Partai Politik, khususnya asas tunggal;
 - 3) kebijakan Mendagri tentang Monoloyalitas PNS;
 - 4) dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang berimplikasi pada konsep “masa mengambang”;
 - 5) pemanfaatan ABRI dan birokrasi dalam memenangkan Golkar.
2. Konfigurasi politik Indonesia 1998 yang menyebabkan pemerintahan Orde Baru jatuh:
 - a. kondisi sosial, ekonomi, politik menjelang jatuhnya Orde Baru;
 - b. perpecahan di Kabinet VII dan berbagai gerakan mahasiswa;
 - c. proses penyerahan jabatan Presiden sebagai pertanda berakhirnya Orde Baru.
3. Konfigurasi politik Indonesia 1999-2009 yang mengakibatkan Partai Golkar mengalami disorientasi politik:
 - a. konfigurasi politik, sistem multipartai, dan faktor yang menyebabkan Golkar mengalami penurunan suara dalam pemilu 1999;
 - b. konfigurasi politik, sistem multi partai, dan faktor yang menyebabkan Golkar sebagai pemenang Pemilu 2004;
 - c. konfigurasi politik, sistem multi partai, dan faktor yang menyebabkan Golkar mengalami penurunan suara kembali dalam Pemilu 2009.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian diambil secara purposif (sesuai kebutuhan) baik yang berasal dari Partai Golkar ataupun yang bukan, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki kaitan langsung dengan fokus penelitian ini. Informasi digali secara mendalam dan komprehensif sampai dianggap mencukupi. Diskusi dengan para pakar dilakukan secara reguler untuk mendapatkan masukan dan kritik konstruktif terhadap data serta argumen yang telah disusun. Pengecekan pada pihak ketiga dilakukan (*triangulasi*) untuk menghindari informasi yang bias. Subjek penelitian adalah :

1. Priyo Budi Santoso (Ketua DPP Partai Golkar);
2. Akbar Tandjung (Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar 2009-2014 dan mantan Ketua DPP Partai Golkar periode 1999-2004);
3. Syarwan Hamid (Golkar Unsur ABRI);
4. Sarwono Kusumaatmadja (Golkar unsur sipil);
5. Budi Harsono (Golkar unsur ABRI);
6. K.H. Syumli Sadli (PPP);
7. K.H. Maskur Hasyim (PPP);
8. J.A. Widodo (PDIP);
9. Gunawan Wirosarodjo (PDIP).

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan *analysis interactive model* dari Miles dan Huberman (1992). Proses analisis data dilakukan dengan kegiatan yang berlangsung secara bersamaan, yakni: a) reduksi data atau penyederhanaan data (*data reduction*), (b) paparan atau sajian data (*data display*), dan (c) penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion, verifying*).

Data disajikan secara sistematis agar lebih mudah dipahami secara utuh dan menyeluruh antara bagian-bagiannya, sehingga memberi kemungkinan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penarikan kesimpulan/ verifikasi tidak lepas dari fenomena permasalahan yang diteliti.

Konfigurasi Politik: Golkar dan Paradigma Baru (1999-2009) yang Mengalami Disorientasi Politik

Konfigurasi Politik: Sistem Multipartai, Golkar Mengalami Penurunan Suara

Setelah Orde Baru berakhir dan B.J. Habibie menjadi presiden, kran politik dibuka lebar, PNS tidak monoyalitas lagi; merdeka menentukan pilihan politiknya; masyarakat diberi kebebasan untuk membentuk partai politik guna menyalurkan aspirasi politiknya. Akibatnya, berdirilah 48 partai politik dan siap mengikuti pemilu.

Pemilu pertama setelah runtuhnya Orde Baru, yaitu Pemilu 1999, dilangsungkan pada 7 Juni 1999, diikuti oleh 48 partai politik. Lima besar Pemilu 1999 adalah PDIP, Partai Golkar, PPP, PKB, dan PAN. Walaupun PDIP meraih suara terbanyak (dengan perolehan suara sekitar 35% persen), yang diangkat menjadi presiden bukanlah calon dari partai itu, yaitu Megawati Soekarnoputri, melainkan yaitu Abdurrahman Wahid (Pada saat itu, Megawati hanya menjadi calon presiden). Hal ini dimungkinkan terjadi karena Pemilu 1999 hanya bertujuan memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD, sementara pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota MPR.

Bagi Golkar, sesaat setelah Orde Baru berakhir mengalami tantangan yang sangat berat, baik dari dalam partai maupun dari luar. Suharto yang sudah lengser dari presiden dan sebagai Ketua Dewan Pembina tidak lagi bertanggung jawab atas nasib Golkar. Golkar kehilangan induknya. Tantangan dari dalam adalah tokoh-tokoh Golkar berebut posisi ketua umum dalam Munaslub 1998 yang kemudian dimenangkan oleh kelompok politikus sipil yang proreformasi, yakni Akbar Tandjung, dengan mengalahkan Edi Sudradjat yang berasal dari lingkungan militer. Hal itu diikuti dengan keluarnya tokoh-tokoh dan pemisahan diri organisasi-organisasi yang dikenal sebagai pendukung (*onderbouw*) Golkar.

Dari luar, Golkar dihadapkan dengan cacikan, hujatan, dan tuntutan untuk dibubarkan karena dituduh yang bertanggung jawab atas terjadinya krisis. Berkat kerja keras jajaran DPP Golkar dengan mengubah diri menjadi Partai Golkar sebagai partai modern yang independen, Partai Golkar masih memiliki harapan hidup dan lolos sebagai peserta Pemilu 1999 bersama 47 parpol lainnya. Dalam pelaksanaan pemilu, Partai Golkar yang diyakini akan banyak kehilangan pendukungnya tersebut, ternyata mampu meraih dukungan suara peringkat kedua setelah PDIP. Partai Golkar yang dalam kondisi tidak menguntungkan tersebut berhasil meraih 22,44% suara dan memperoleh 120 kursi di DPR.

Memang dibandingkan dengan perolehan dukungan suara dalam Pemilu 1997, perolehan Partai Golkar masih terlihat **turun drastis**, dari 74,51% suara pada Pemilu 1997 menjadi 22,44% suara pada Pemilu 1999. Namun demikian, kondisi seperti itu menambah percaya diri jajaran DPP Partai Golkar bahwa mereka telah berhasil melewati ujian yang paling berat dalam sejarah hidupnya.

Berdasarkan uraian di muka dapat disimpulkan bahwa menurunnya suara Partai Golkar dalam Pemilu 1999 dibandingkan dengan Pemilu 1997 dapat dilihat dari dua sisi, dari sisi internal: (1) Ketua Dewan Pembina Golkar era Orde Baru tidak mewariskan struktur politiknya secara utuh kepada generasi penerusnya, sehingga Golkar tidak siap menghadapi konfigurasi politik multipartai yang kompetitif, (2) antartokoh partai berselisih pendapat sampai berakhir dengan pemisahan organisasi-organisasi pendukungnya; (3) dukungan militer dan PNS sudah tidak ada lagi.

Dari sisi eksternal partai: (1) kebijakan pemilu cukup kompetitif; (2) ikut sertanya 47 partai politik dalam Pemilu 1999; (3) agenda reformasi memberikan harapan baru masa depan bangsa yang lebih demokratis., yang berarti mengurangi suara Partai Golkar.

Konfigurasi Politik: Sistem Multipartai, Golkar sebagai Pemenang Pemilu

Konfigurasi politik 1999-2004 tergambar dari terbentuknya partai-partai politik baru, selain yang sudah ada (Golkar, PPP, dan PDI). Pada intinya, beberapa partai baru merupakan derivasi dari ketiga kekuatan politik tersebut. Untuk Golkar, misalnya, pada 1998 dilakukan Munaslub dan terpilih Akbar Tandjung sebagai ketua umumnya. Golkar menjadi Partai Golkar dengan paradigma baru, sebuah entitas politik yang berbeda dengan sebelumnya. Tetapi pasca-Munaslub beberapa elite Golkar mendirikan partai politik baru, seperti Jenderal (Purn.) Edy Sudradjat membuat Partai Keadilan dan Pembangunan (PKP), Ny. Mien Soegandhi mendirikan Partai MKGR, dan sebagainya.

PPP sebagai partai berbasis masa Islam juga memperoleh pesaing baru, seperti PKB yang berbasis masa NU, dan PAN yang berbasis masa Muhammadiyah. Belum lagi yang lain. PDI juga demikian. Hadir PDIP dan partai-partai lain yang dibentuk oleh elite-elite PDI sebelumnya. Ini mencerminkan bahwa sistem multipartai yang dikehendaki pemerintah, direspon antusias oleh masyarakat dengan mendirikan partai-partai politik. Tentu saja semua itu merupakan kompetitor-kompetitor baru. Jumlah parpol ratusan saat itu, tetapi yang terseleksi sebagai kontestan Pemilu 1999 sebanyak 48 parpol.

Partai Golkar merupakan pemenang kedua pada Pemilu 1999, tetapi pada Pemilu 2004, Partai Golkar memenangkan pemilu dengan memperoleh suara 21,58% suara sah. Jika direnungkan, keberhasilan Partai Golkar dalam Pemilu 2004 tersebut dapat dijelaskan dari sisi internal: (1) Partai Golkar benar-benar berjuang sekuat tenaga berbenah diri menjadi partai modern, independen, tidak lagi menjadi mesin politik pemerintah; (2) mesin politik yang telah terbentuk di era Orde Baru sampai di tingkat Desa, dihidupkan kembali; (3) lebih demokratis dalam setiap pengambilan keputusan; (4) bertahannya pemilih tradisional yang semasa Orde Baru banyak menguntungkan Golkar; dan (5) faktor pribadi Akbar Tandjung yang dinilai berbagai kalangan mampu mengelola Partai Golkar menjadi partai termodern di tanah air.

Menurut Denny J.A. (2006), pertama-tama terjadi perubahan *political mood* yang sangat radikal di kalangan publik luas atas Reformasi. Di awal Reformasi, mereka begitu antusias ; harapan mereka atas Reformasi begitu tinggi. Mereka menyenangi segala hal yang berhubungan dengan politik Reformasi. Sekaligus mereka juga menjauhi segala hal yang menjadi musuh politik Reformasi. Namun, setelah lima tahun, harapan atas Reformasi kandas. Kekecewaan demi kekecewaan atas Reformasi tumbuh. Akibatnya, mereka justru marah dengan semua atribut yang berhubungan dengan Reformasi.

Selain *political mood*, menurut Denny J.A. (2006), yang membuat Golkar mampu mendominasi kembali politik adalah bertahannya pemilih tradisional. Setiap partai besar memiliki pemilih tradisional dan fanatiknya sendiri. Apa pun yang terjadi dengan partai itu, dan sebegus apa pun program yang ditawarkan partai lain, pemilih tradisional tetap memilih partai itu.

Faktor lain yang membuat Golkar mampu bangkit kembali menurut Denny J.A. (2006) adalah *leadership* dari Akbar Tandjung sendiri. Walau terkena sanksi hukum saat itu, Akbar Tandjung paling sering turun ke daerah. Dibandingkan dengan partai lain, Golkar adalah partai yang paling siap dan paling terencana menghadapi Pemilu 2004. Aneka mobilisasi dan skenario strategi menghadapi pemilu 2004 disiapkan dengan baik. Banyak gubernur di daerah yang tetap berhasil dikuasai oleh pendukung Golkar. *Leadership* Akbar Tandjung niscaya berperan besar dalam mengantarkan kembali Golkar sebagai pemenang Pemilu 2004.

Dari faktor eksternal, menurut Denny J.A. (2006), kemenangan Golkar terjadi karena: (1) sudah enam tahun reformasi ternyata pemerintah reformasi tidak juga dapat meningkatkan ekonomi warga Negara, akibatnya sebagian masyarakat rindu pemerintah Orde Baru dan kembali memilih Partai Golkar; (2) pemerintahan Megawati ternyata dinilai kurang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, akibatnya sebagian pendukung PDIP dalam pemilu 1999 mengalihkan dukungannya ke Partai Golkar.

Konfigurasi Politik: Sistem multipartai, Golkar Mengalami Penurunan Suara Kembali

Meskipun demokratisasi internal partai di diakhir masa kepemimpinan Akbar Tanjung semakin ditingkatkan dengan menyelenggarakan konvensi calon presiden yang diusung Partai Golkar, namun ternyata budaya konvensi tersebut tidak dilanjutkan. Dengan demikian, citra Partai Golkar sebagai partai demokratis, aspiratif dalam kaderisasi kepemimpinan yang sudah dibangun, memudar kembali. Akibatnya, kemenangan Partai Golkar dalam Pemilu 2004 tidak dapat dipertahankan dalam Pemilu 2009.

Dalam perebutan ketua umum di Munas VII Partai Golkar, Akbar Tandjung dikalahkan oleh Jusuf Kalla mewakili kubu pengusaha yang saat itu menjadi wakil presiden. Kemenangan Jusuf Kalla dimanfaatkan oleh elite Partai Golkar yang dekat untuk *mencari jabatan (job seeker)*. Karena kesibukannya sebagai Wapres, maka upaya membangun partai menjadi partai modern yang telah dirintis ketua umum sebelumnya menjadi terbengkalai. Hampir tidak ditemui aktivitas-aktivitas partai yang mencerminkan sebagai partai modern, tidak lagi independen, elite partai banyak bergantung pada pemerintah. Keadaan ini dibaca publik bahwa partai Golkar kembali ke masa Orde Baru, menjadi partai pendukung pemerintah meskipun tidak sampai menjadi partainya pemerintah. Di mata publik, partai Golkar sudah mengalami disorientasi politik dari doktrin, visi-misi, platform, dan garis perjuangan partai. Dalam kondisi seperti itu, kritik-kritik konstruktif dari kader partai terhadap kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat menjadi jarang ditemui. Oleh karena itu, wajar jika dalam Pemilu 2009 Partai Golkar mengalami kekalahan, jauh dibandingkan Pemilu 2004. Partai Golkar hanya berada pada peringkat kedua setelah Partai Demokrat sebagai partai baru. Suara yang diperoleh hanya 14,5% jauh lebih rendah dari perolehan Pemilu 2004 sebesar 21,58%.

Dilihat dari faktor eksternal, menurunnya perolehan suara Partai Golkar hasil Pemilu 2009 juga disebabkan karena magnet figur Susilo Bambang Yudhoyono yang mampu menyumbang perolehan suara Partai Demokrat sebesar 20.81%, padahal ketika Pemilu 2004 hanya mendapat suara 7.45%..

Sebagai verifikasi dapat disimpulkan, konfigurasi politik 1998-2009 yang mengakibatkan Partai Golkar mengalami disorientasi politik, sehingga mengalami penurunan suara kembali dalam Pemilu 2009, disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi berikut: (1) Meskipun demokratisasi internal partai di diakhir masa kepemimpinan Akbar Tanjung semakin ditingkatkan, ternyata budaya konvensi tersebut tidak dilanjutkan. Dengan demikian, citra Partai Golkar sebagai

partai demokratis, aspiratif dalam kaderisasi kepemimpinan yang sudah dibangun, memudar kembali. (2) Dalam perebutan ketua umum di Munas VII Partai Golkar, Akbar Tandjung dikalahkan oleh Jusuf Kalla mewakili kubu pengusaha yang saat itu menjadi wakil presiden. Kemenangan Jusuf Kalla itu dimanfaatkan oleh elite Partai Golkar yang dekat untuk mencari jabatan (*job seeker*), sehingga terlihat oligarkis. Keadaan ini menggugurkan citra partai sebagai partai yang mengedepankan kepentingan anggota. (3) Karena kesibukan Jusuf Kalla sebagai Wapres, upaya membangun partai menjadi partai modern menjadi terbengkalai. Keadaan ini dibaca publik bahwa partai Golkar ada kecenderungan kembali ke masa Orde Baru, menjadi partai pendukung pemerintah meskipun tidak sampai menjadi partainya pemerintah. Dalam kondisi seperti itu, kritik-kritik konstruktif dari kader partai terhadap kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat jarang ditemui. Oleh karena itu, wajar jika dalam Pemilu 2009 Partai Golkar mengalami kekalahan..

Faktor eksternal mencakup hal-hal berikut: (1) Magnet figur Susilo Bambang Yudhoyono yang mampu menyumbang perolehan suara Partai, (2) Beberapa elite Partai dari Partai Golkar dan mendirikan partai sendiri. Hal ini berpengaruh terhadap suara Golkar dalam Pemilu 2009.

Kesimpulan

Kajian tentang konfigurasi politik Golkar dalam turut menata negara pada kurun 1971-2009 dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Konfigurasi politik Indonesia 1971-1997 menempatkan Golkar sebagai kekuatan tunggal karena Orde Baru yakin hanya dengan mendirikan dan membesarkan Golkar pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar, aman terkendali. Berbagai upaya diciptakan untuk mempertahankan kekuatan tunggal tersebut, meskipun merugikan parpol lain. Hasilnya, Golkar bertahan menjadi kekuatan tunggal sampai Pemilu 1997.
2. Konfigurasi politik Indonesia 1998 menyebabkan Pemerintahan Orde Baru jatuh sebab eksistensi Golkar di era Orde Baru tidak sejalan dengan jati diri suatu parpol, yang seharusnya dibentuk oleh rakyat dan digunakan sebagai penyalur aspirasi rakyat dalam turut mengelola negara, maka rakyat berupaya menjatuhkan Orde Baru dan berhasil menekan Presiden hingga 21 Mei 2008 presiden mengundurkan diri.
3. Konfigurasi politik Indonesia di era reformasi tahun 1999 -2009 mengakibatkan Partai Golkar mengalami disorientasi politik, sehingga perolehan suaranya turun drastic. Hal itu disebabkan: (1) Ketua Dewan Pembina Golkar era orba tidak mewariskan struktur politiknya kepada generasi penerus, sehingga Golkar kehilangan kendali; (2) Golkar belum siap dalam sistem politik yang kompetitif dan independen; (3) modernisasi partai yang dirintis Akbar Tandjung tidak dikembangkan lagi; (4) Golkar dikendalikan oleh elite-elite pragmatis dan oligarkis; (5) keluarnya kader-kader potensial dan mendirikan partai sendiri; (6) munculnya partai-partai reformis; dan (7) magnet SBY.

Saran-saran

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan hasil penelitian, dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut.

1. Independensi partai dan kekritisan terhadap kebijakan-kebijakan penyelenggaraan negara yang kurang menguntungkan rakyat dan negara secara konsisten hendaknya ditingkatkan. Dipercayanya beberapa elite partai untuk memperkuat kabinet hendaknya tidak mengurangi sikap kritis terhadap penyelenggara negara dan independensi partai.
2. Jatuhnya Presiden Suharto di antaranya terjadi karena Suharto kurang memperhatikan aspirasi politik rakyat. Oleh karena itu, hendaknya Partai Golkar mendengarkan aspirasi politik rakyat, baik

anggota maupun bukan, mengembangkan kebijakan-kebijakan partai secara *bottom-up* melalui mekanisme musyawarah, sehingga dapat menumbuhkan “rasa memiliki” partai bagi anggota dan jajaran pengurus partai, yang dampaknya dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam membesarkan partai.

3. Modernisasi Partai Golkar era Akbar Tandjung terbukti dapat memenangi Pemilu 2004. Oleh karena itu, ke depan hendaknya: (1) Partai Golkar lebih demokratis dalam memilih pimpinan partai dan calon presiden dari partai, sehingga kalau sudah diputuskan partai tidak ada lagi anggota pimpinan lain yang mencoba menggembosinya; (2) menghindari pragmatis, mengejar kepentingan jangka pendek, oligarkis, yang menyebabkan partai mengalami disorientasi politik; (3) sedapatnya anggota DPR/DPRD partai lebih mengutamakan kepentingan pemilihnya daripada kepentingan ketua fraksi atau partainya yang tidak sejalan dengan kepentingan pemilih.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar – dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Alfian. 1980. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Amal, Ichlasul (ed.). 1988. *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Anderson, James E. 2006. *Public Policy Making: An Introduction*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Arsyad, H.M. Sanusi. 2009. “Relasi antara Korupsi dan Kekuasaan”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 2, 2009.
- Baswedan, Anies Rasyid. 2004. “Political Islam: Present and Future Trajectory”. *Asean Survey*, Vol. 44.
- Baswedan, Anies Rasyid. 2004. “Sirkulasi Suara dalam Pemilu 2004”. *Makalah*.
- et al. 1999. *Golkar dalam Menapak Pemilihan Umum Orde Baru*. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Politik, Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada.
- Beck, P.A dan Sorauf F.J. 1992. *Party Politics in America*. New York: Harper Collins Publishers.
- Budiardjo, Mariam. 1982. *Partisipasi Politik dan Partai Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Mariam. 1997. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiman, Arief. 1982. “Bentuk Negara dan Pemerataan Hasil-hasil Pembangunan,” *Prisma* No. 7 Tahun XI, Juli.
- Budiman, Arief. 1985. “Negara, Kelas, dan Formasi Sosial”. *Keadilan*. No. 1, Thn. XII.
- Budiman, Arief. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia
- Bungin, M. Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Cheibub, Jose Antonio. 2007. *Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy*. Cambridge: University Press.
- Cipto, Bambang. 1996. “Revolusi Partisipasi dan Masa Depan Partai Politik di Indonesia” *Prisma*, No. 8, Tahun XXV, Agustus 1996.
- Croley, Steven P. 2008. *Regulation and Public Interests: The Possibility of Good Regulatory Government*. Princeton: Princeton University Press.
- Dhakidae, Daniel. 1991. “Pemain-pemain Utama dalam Pentas Sejarah Orde Baru”. *Prisma*. Edisi Khusus 20 tahun Prisma 1971-1991.
- Denny J.A. 2006. *Memperkuat Pilar Kelima Pemilu 2004 dalam Temuan Survei LSI: Kemenangan Kembali Partai Golkar*. Yogyakarta: LKIS.

- Fatah, R. Eep Saefullah. 1994. "Demokratisasi dalam Kepolitikan Orde Baru: Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia". *Prisma*. No. 10. Oktober 1994.
- Feith, H. 1999. *Pemilihan Umum di Indonesia 1955*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Feith, H. 1962. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Firdaus. 2005. "Politik Hukum Di Indonesia: Kajian Dari Sudut Pandang Negara Hukum". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 12 No. 10. September.
- Fischer, Frank, Miller, Gerald J. and Mara S. Sidney (eds.). 2007. *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics and Methods*. Boca Raton: CRC Press.
- Gaffar, Afan, dkk. 1993. *Golkar dan Demokratisasi di Indonesia*. Yogyakarta: PPSK.
- Gaventa, Jhon dan Valderama, Camilo. 2001. "Partisipasi, Kewargaan, dan Pemerintah Daerah," dalam pengantar buku *Mewujudkan Partisipasi; Teknik, Partisipasi Masyarakat untuk Abad 21*. The British Council dan New Economics Fondation.
- Gerston, Larry N. 2002. *Public Policy Making in a Democratic Society: A Guide to Civic Engagement*. Armonk: M. E. Sharpe.
- Gunther, R., Montero, J.R., Linz, J. 2002., *Political Parties: Old Concepts and New Challenges*. New York: Oxford University Press.
- Geertz, C. 1960 *The Religion of Java*, Chicago, IL: The University of Chicago Press.
- Hoover, Kennet. H R. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Imawan, Riswandha. 2004. "Partai Politik Di Indonesia: Pergulatan Setengah Hati Mencari Jati Diri." *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada* pada tanggal 4 September 2004. Yogyakarta, UGM.
- Irawanto, Budi. 1999. *Film, Ideology, dan Militer; Hegemoni Militer dalam Sinema Indonesia*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Irnawati. 2012. "Konfigurasi Politik Demokratis Dalam Karakter Produk Hukum Yang Responsif Di Era Reformasi". *Socioscientia: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*. Vol. 4 no. 1.
- Irawanto, Budi. 1999. *Film, Ideology, dan Militer; Hegemoni Militer dalam Sinema Indonesia*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Jenie, Rezlan Izhar. 1981. "Pemikiran Jenderal A.H. Nasution tentang peranan militer dalam politik di Indonesia". *Skripsi FIS UI*.
- Juan Linz, 1978. "The Perils of Presidentialism" dan "The Virtues of Parleментарism" dalam *Journal of Democracy*. No. 1 dan No. 4.
- K.C. Dowdall, 1923. *The Word "State."*. London: Stevens & Sons Ltd.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang. Jakarta.
- King, D.Y. 2003. *Half-Hearted Reform: Electoral Institutions and the Struggle for Democracy in Indonesia*. Westport, Conn: Praeger.
- Koirudin. 2004. *Partai Poltik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Komisi Pemilihan Umum. 2011. "Modul 1-Pemilu Untuk Pemula: Bab II Pemilu di Indonesia". [Http://kpukita.blogspot.Com/2011/02/modul-1-pemilu](http://kpukita.blogspot.Com/2011/02/modul-1-pemilu). Akses 20 Nopember 2013.
- Legge, John D. 2001. *Sukarno: Biografi Politik*. Jakarta: Sinar Harapan.

- Mahfud, M.D. Moh. 2011. *Politik Hukum di Indonesia*. Edisi revisi. Jakarta. Rajawali Press.
- Miles, M.B. dan Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Alih bahasa: Tjetjep Rohendi Rohidi dan Mulyasa. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Muchsin, Fadillah Putra. 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik, Analisis atas Praktek Hukum dan Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor Perekonomian di Indonesia*. Malang: Averros Press.
- Mulkan, Abdul Munir. 1992. *Runtuhnya Mitos Politik Santri*. Yogyakarta: Sypress.
- Nasri, Diany Lazuar. 2003. *Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003*. Jakarta: Durat Bahagia.
- Ndraha, Taliziduhu. 1989. *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nishihara, Mashashi, 1972. *Golkar and the Indonesian Elections of 1971 (Monograph Series)*. Ithaca, New York: Modern Indonesia Project, Cornell University.
- Oliver, Dawn. 2003. *Constitutional Reform in the United Kingdom*. 1 edition Oxford: OUP.
- Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM.
- “Partai Persatuan Pembangunan”. http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_persatuan_pembangunan.
- “Partai Demokrasi Indonesia”. http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_persatuan_pembangunan.
- PP. Nomor 6 Tahun 1970 tentang Pengaturan Kehidupan Politik Pejabat-pejabat Negeri dalam Rangka Pembinaan Sistem Kepegawaian Negeri Republik Indonesia. Jakarta.
- Poesponegoro, Marwati dan Notosusanto, Nugroho, 1984. *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid VI. Jakarta: Depdikbud dan Balai Pustaka.
- Pusat Studi Hukum Konstitusi UII. 2005 “Multi Partai, Presidensialisme dan Efektivitas Pemerintahan” *Artikel*. Diambil dari <http://pshk.law.uui.ac.id/index.php.thl>. Akses 10 Maret 2013.
- Rasyid, Muhammad Ryass, 1994. *State Formation, Party System, and The Prospect for Democracy in Indonesia: The Case of Golongan Karya (1967-1993)*. Disertasi Ilmu Politik University of Hawaii.
- Riadi, Muchlisin, 2013. “Partai Politik”, *artikel*. <http://www.kajianpustaka.com> edisi 19 Januari 2013.
- Saerozi, Ahmad. 2010. “Negara dan Nahdlatul Ulama: Studi tentang Karakteristik Respon Organisasi Keagamaan Nahdlatul Ulama terhadap Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1926-1942.” *Disertasi*. Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Sanit, Arbi. 1988. “Organisasi Politik, Organisasi Massa, dan Politik Demokratisasi Masyarakat”. *Prisma*. No. 6, Tahun XVII.
- Santoso, Priyo Budi. 1995. *Birokrasi Pemerintahan Orde Baru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sartori, Giovanni, 1976. *Parties and Party Systems: a Framwork for Analysis*. Cambridge: University Press.
- “Sejarah Partai Demokrasi Indonesia.” 2013. http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_demokrasi_indonesia.
- “Sejarah Partai Persatuan Pembangunan.” 2013. <http://id.wikipedia.org/wiki/>

- Partai_Persatuan_Pembangunan.
- Simatupang, TB. 1987. *Dari Revolusi ke Pembangunan*. Jakarta : BPK Gunung Mulia.
- Sitepu, P. Anthonius, 2006. *Sistem Politik Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Smith, Kevin B. dan Larimer, Christopher W. 2009. *The Public Policy Theory Primer*. Boulder: Westview Press.
- Sparringga, Daniel. 2004. “Golkar Butuh Banyak Orang Seperti Akbar Tandjung”, dalam Dasman Djamiluddin (ed.) *Golkar sebagai Partai Alternatif*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI.
- Stiefel, Matthias dan Wolfe, Marshall, 1994. *Political Participation; Economic Development; Social Aspects; Latin America*. United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), Geneva (London and Atlantic Highlands, N.J.).
- Sudarwan, Danim. 2000. *Metode Penelitian untuk Ilmu-Ilmu Perilaku*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudjito, Arie. 2012. “Parpol Alami Disorientasi Politik”. *Investor Daily Indonesia*, 11 Juni 2012.
- Sukarna, 1981. *Sistem Politik*. Bandung: Alumni.
- Suseno, Franz Magnis. 1993. *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius.
- Suseno, Franz Magnis. 1995. *Kuasa dan Moral*, Jakarta: PT Gramedia.
- Suroto, 2003. *Partai-partai Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Citra Mandala Pratama.
- Suryadinata, Leo. 1999. *Golkar dan Militer*. Jakarta: LP3ES.
- Sutjuti, Maliki. 2001. *Politik Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah Jombang: Studi tentang Hubungan Agama, Negara, dan Masyarakat*. Yogyakarta: Galang Press.
- Tandjung, Akbar. 2007. *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wanandi, Jusuf. 1984. “Peran ABRI Surut Ke Belakang”. *Prisma*. No. 1, Tahun XIII, Maret 1984.
- Widyarsono, A. 1992. “Paham Negara Rasional Hegel dalam Filsafat Hukumnya,” *Driyarkara*, No. 3 Tahun XVIII.
- Wirjono, Prodjodikoro. 1981. *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*. Jakarta: PT Eresco. [www.wikipedia.org/pemilihan umum legislatif 1971](http://www.wikipedia.org/pemilihan_umum_legislatif_1971). Akses 1 Oktober 2013.
- Yulianto, Arif. 2002. *Hubungan Sipil Militer Indonesia PascaOrba*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yuwono, Sutopo. 1983. “Peranan dan Batas Dwifungsi ABRI”. *Prisma*. No. 1. Tahun XII, Januari 1983.
- Zaini, Hasan. 1991. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Zulkifli, Ijul. 2012. “Pelebagaan Partai Politik”. www.manajemen.web.id/2012/pelebagaan-partai-politik.html. Akses 22 Pebruari 2012.